



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONSI FREDIK LIAN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 520950

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5.836 m²/144 m² di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/36 m² di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2005, HIBAH TANPA AKTA Rp. 78.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 279.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.075.000.000

III. HUTANG Rp. 480.803.003

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 594.196.997

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.